



Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani

Oni Lestari¹, Hendra Wijayanto^{1*}

¹Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus Jakarta, Jakarta Utara, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: 08 Nov, 2021

Diterima: 26 Jan, 2022

Dipublikasi: 31 Jan, 2022

Kata Kunci:

Implementasi; Kartu Tani;
Kebijakan; Pupuk
Bersubsidi;

Koresponden:

Hendra Wijayanto

Jurusan Ilmu Administrasi
Publik, Universitas 17 Agustus
Jakarta, Jakarta Utara, 14350,
Jakarta-Indonesia

Email:

hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Sitasi Cantuman:

Lestari, O. & Wijayanto, H.
(2022). Implementasi Kebijakan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Melalui Program Kartu Tani.
Journal of Political Issues.
3(2); 98-106.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study aims to determine the implementation of subsidized fertilizer distribution policies through the farmer card program to pineapple farmers in Siwarak Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, based on the Decree of the Director General of Agricultural Infrastructure and Facilities Number 11/Kpts/SR.310/30/2020 concerning Technical Instructions for the Implementation of Provision and Distribution of Subsidized Fertilizers for Fiscal Year 2020. The method used in this research is descriptive qualitative and data acquisition is done through structured interviews, field observations and documentation review. The results showed that the making of Farmers' Cards in Siwarak Village was in accordance with the regulations, namely proposal, issuance and redemption, but in its application it was still not optimal. Supporting factors for implementation are the presence of competent human resources, adequate budget and community participation. The inhibiting factors are seen from the limited distance and cost in accessing subsidized fertilizers, obstacles in the preparation and validation of the Group Needs Definitive Plan (RDKK) and the weak network in accessing Farmer Cards.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, berlandaskan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/30/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan perolehan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan serta telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai pada regulasi yaitu pengusulan, penerbitan dan penebusan, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Faktor pendukung dari implementasi yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dilihat dari adanya keterbatasan jarak dan biaya dalam mengakses pupuk subsidi, hambatan dalam penyusunan dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta lemahnya jaringan dalam mengakses Kartu Tani.

Tentang:

Oni Lestari, Penulis saat ini telah lulus studi S-1 Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Hendra Wijayanto, menyelesaikan studi S2 di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satu kekayaan alam yang melimpah terletak di darat berupa lahan pertanian yang sangat luas. Sebagai negara agraris sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pertanian juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis PDB sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan secara positif, yakni sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44 persen, sektor pengadaan air sebesar 1,28 persen, sementara itu pertumbuhan PDB sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni 2,19 persen. ([Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, 2020](#)).

Pada kenyataannya, pertanian merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kesejahteraan petani belum meningkat secara merata dibandingkan dengan pekerja di sektor industrialisasi dan perdagangan. Pemerintah sebagai badan utama penyelenggara negara memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan petani. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan diimbangi dengan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna. Untuk menunjang kegiatan pertanian diperlukan komponen yang dapat memperlancar proses produksi. Salah satu faktor terpenting dalam proses produksi pertanian adalah penggunaan pupuk. Untuk mengurangi penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pemupukan yang tepat dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas ([Hartatik, et al, 2015](#)).

Ketersediaan pupuk yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat ditentukan dari peran serta dari pemerintah daerah setempat. Salah satu peran pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan pupuk yang dihadapi petani adalah dengan menyediakan pupuk bersubsidi. Kebijakan suplementasi pupuk di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, maka pemerintah melakukan upaya pengawasan terhadap alokasi pupuk bersubsidi melalui Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang pada Pengawasan.

Dalam rangka menyempurnakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang banyak menemukan kendala dilapangan, serta guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani maka pemerintah membuat program Kartu Tani untuk memudahkan petani dalam mengakses dan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kartu tani menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.1/ 014723 tentang Petunjuk Teknis Kartu Tani Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) di Provinsi Jawa Tengah, kartu tani merupakan Kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin Electronic Data Captur (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya ([Biroinfrastada Jawa Tengah, 2020](#)).

Salah satu daerah di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan program Kartu Tani adalah di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Selain terkenal dengan desa wisata alam, Desa Siwarak merupakan sentral penghasil nanas di Kecamatan Karangreja sekaligus penghasil nanas terbesar di Kabupaten Purbalingga. Luas wilayah Desa Siwarak adalah 672.750 Ha yang terdiri dari tanah perumahan, sawah, tegalan, hutan negara dan lain-lain. Sekitar 1.507 penduduk Desa Siwarak bekerja sebagai buruh tani serta petani 861 jiwa, mayoritasnya adalah petani nanas baik sebagai pemilik maupun penggarap.

Pada dasarnya penggunaan Kartu Tani bagi petani nanas Desa Siwarak akan memberikan keuntungan bagi petani, khususnya dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang didapatkan dikios pupuk lengkap (KPL) desa. Namun, berdasarkan observasi awal penggunaan Kartu Tani di Desa Siwarak belum optimal dikarenakan informasi Kartu Tani belum menyeluruh ke seluruh petani nanas Desa Siwarak, proses distribusi Kartu Tani tercetak cukup lama sehingga menghambat petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Serta adanya permasalahan dalam proses penyusunan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang mana data tersebut digunakan sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran kartu tani.

Berkenan dengan hal tersebut, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi dari program kartu tani pada petani nanas di Desa Siwarak. Dengan harapan adanya program kartu tani ini dapat dijadikan peluang besar bagi petani nanas untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sebagai bahan penunjang pertanian nanas di Desa Siwarak dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, menjadikan petani nanas untuk memiliki keinginan mengakses dan memanfaatkan Kartu Tani. Serta sebagai upaya bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa adanya tambahan manipulasi dalam hasil penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Pada penelitian ini digunakannya metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, data primer didapat dari hasil observasi, wawancara serta telaah dokumentasi yang sudah dilaksanakan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder didapat dari informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari arya tulis ilmiah, buku, ataupun berita di berbagai media. Informan pada penelitian ini berjumlah tiga belas yang terdiri dari dua bagian seksi produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, dua pegawai Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangreja, satu pegawai BRI KCP Unit Karangreja, dua ketua kelompok tani dan 5 petani nanas Desa Siwarak.

3. LANDASAN TEORITIK

Kebijakan Publik

James Anderson (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu masalah atau arah tindakan yang disengaja yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik sebagaimana dikutip dalam Arifin Tahir (2011), menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah pilihan apakah pemerintah akan melakukannya atau tidak”. lakukan tidak dieksekusi. Artinya, pemerintah dapat memutuskan untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuan, dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan yang diinginkan pemerintah atau pejabatnya. Ini juga merupakan kebijakan nasional bahwa pemerintah tidak melaksanakannya.

Selain itu, Mulyadi (2016) menyatakan bahwa kebijakan publik mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai kehumasan, masalah publik, dan sumber daya yang ada untuk dilaksanakan bersama oleh pemerintah untuk kepentingan lain. proses kerja yang berkesinambungan dan saling berhubungan dengan seseorang untuk kepentingan masyarakat. Berbagai proses tersebut meliputi pengembangan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahap ini tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Tahap pembangunan berjalan dengan baik, namun kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tahapan implementasi dan evaluasi menjadi penting untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan harus dikaitkan dengan pandangan ahli bahwa kebijakan yang dibuat pada tiap tahun harus dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Edward III perlu dilaksanakan kebijakan tersebut dengan berbagai alasan dan perspektif. Implementasi politik diperlukan karena ada isu-isu politik yang perlu dibenahi dan diselesaikan. Edward III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan menanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2012).

Menurut buku Guntur Setiawan (2004) tentang Pelaksanaan Birokrasi Pembangunan, ia menyatakan pejabat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi kebijakan yang ada. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah (Agustino, 2006).

Model Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan “*integrated implementation model*” yang dikemukakan Soren C Winter (2003). Dimana Soren mengemukakan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan antara lain:

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi (*Behavior Realtionship Between*)

Dimensinya mencakup Komitmen dan Koordinasi, komitmen adalah kesepakatan bersama dengan intansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoism diantara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Semntara itu, pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi.

2. Perilaku Aparat Birokrasi Tingkat Bawah (*Street Level Bureaucratic Behavior*)

Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan silur kewenangan formal (diskersi), sehingga menurut Lipsky (1980) perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya menyimpang dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Dalam implementasi tersebut diutamakan adanya hubungan antara masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Dengan demikian birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya ditentukan dengan adanya standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya

3. Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Grup Behavior*)

Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Perilaku kelompok sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan public adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negative (Winter, 2003).

Kebijakan Sosial

Dalam rangka mencapai tujuan bangsa, maka dibuatlah kebijakan kesejahteraan rakyat (*Social Welfare*). Menurut Suhartoo (2009) kesejahteraan sosial diartikan sebagai sebuah

keadaan yang mana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kebutuhan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan dalam upaya mengembangkan potensi diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi hidup sosial. Sementara itu, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. (Suharto, 2005).

Pengertian Program

Menurut Nawawi (2007) mengemukakan bahwa program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan dijalankan. Setiap program kebijakan yang disusun selalu mengacu pada kebijakan dan program yang telah ditentukan.

Pendapat lain berbeda, menurut Arikunto (2014) menyebutkan bahwa program merupakan suatu sistem, dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan tidak hanya satu kali namun dilakukan secara rutin dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu kali namun berkelanjutan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai aturan perundang-undangan.

Kartu Tani

Dalam definisinya kartu tani adalah Kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi mulai dari mesin Electronic Data Capture (EDC) dari Bank BRI yang ditempatkan di Pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Tujuan dari kartu tani adalah terwujudnya pendistribusian pupuk bersubsidi dengan asas 6 (enam) tepat, yaitu tepat dari segi jumlah, tepat dari segi jenis, tepat dari segi waktu, tepat dari segi tempat, tepat dari segi mutu, dan tepat dari segi harga beli. Serta sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan perbankan bagi petani, khususnya Jawa (Biroinfrasda Jawa Tengah, 2020). Proses pelaksanaan kartu tani dilakukan secara bertahap dimulai dari pendataan dan verifikasi data, penerbitan kartu tani, dan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu anggota kelompok penggarap sawah

Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan komponen yang paling penting dalam menunjang proses produksi pertanian, pemilihan pupuk yang berimbang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil pertanian. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau (Hartatik, et.al, 2015). Menurut Suparmoko (2014) dalam bukunya “Keuangan Pemerintah : Pengeluaran dan Pembelanjaan” menyatakan bahwa subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah industri di tingkat besar dan industri di tingkat rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu dalam memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

Pupuk bersubsidi merupakan bahan kebutuhan yang diperlukan oleh petani yang mana pengadaannya dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok penggarap sawah atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA. Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi

harus memenuhi prinsip 6 tepat yaitu prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah harga, tempat, waktu dan kualitas barang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Tani di Desa Siwarak

Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi mengenai informasi program Kartu Tani terdapat perbedaan, hal tersebut berkaitan dengan keterlibatan dan keaktifan peran dari kelompok tani, masing-masing ketua RT dan Kepala Dusun (Kadus). Selanjutnya, pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah berdasarkan pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/kpts/SR.310/B/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yaitu pengusulan, pencetakan dan penebusan.

Proses pembuatan Kartu Tani terutama dalam penditiusubsiannya berdasarkan hasil penelitian waktu yang diperlukan untuk distribusi Kartu Tani cukup lama, karena didalam prosedurnya pembuatan Kartu Tani harus memenuhi beberapa langka yang berbeda dengan kartu ATM biasa. Selain itu, partisipasi dari stakeholder yang terlibat juga mempengaruhi lamanya waktu distribusi kartu tani. Sehubungan dengan sarana dan prasana penunjang program Kartu Tani di Desa Siwarak, berdasarkan hasil penelitian pada tingkatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sudah tersedia wifi, alat tulis menulis namun pada fasilitas utama seperti komputer mengalami kerusakan dan pencurian. Sementara itu pada Kios Pupuk Lengkap (KPL) terdapat sejumlah fungsi Elektronik Data Capture (EDC) yang digunakan untuk pelayanan Kartu Tani

Berdasarkan hasil temuan di lapangan kategori pupuk untuk tanaman nanas dan mutu pupuk subsidi sudah tersedia di KPL Desa Siwarak yaitu NPK ponska, UREA, SP36, ZA harga pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pejabat daerah. Sehubungan hasil penelitian, meskipun alokasi pupuk bersubsidi sudah sesuai HET dan ketersediaan pupuk untuk pertanian nanas sudah ada, namun terdapat perbedaan pandangan antara petani nanas dengan pemerintah dalam hal ini penyuluh pertanian terkait dengan jumlah pupuk yang ada pada Kartu Tani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian nanas.

A. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

a) Komitmen

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai komitmen yaitu terkait wujud konkrit yang diberikan oleh instansi pemerintah dalam hal ini seperti Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, serta Bank BRI KCP Unit Karangreja dalam melaksanakan Implementasi kebijakan penyaluran bersubsidi melalui program Kartu Tani. Berdasarkan hasil penelitian wujud komitmen dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah dikerahkannya seluruh bagian dari dinas pertanian seperti peran penyuluh pertanian, adanya ketersediaan fasilitas, komunikasi aktif dan sosialisasi yang masif kepada organisasi tingkat bawah lainnya.

Wujud komitmen yang diberikan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja adalah dengan pertemuan antar kelompok petani desa serta penggunaan berbagai media baik cetak maupun elektronik yang berkembang yang dimiliki oleh BPP. Sementara itu, wujud komitmen yang dilakukan oleh Bank BRI KCP unit Karangreja adalah melalui kerjasama antarorganisasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbuka berkaitan dengan penggunaan Kartu keanggotaan petani.

b) Koordinasi

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani di Desa Siwarak melibatkan beberapa Instansi yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga melalui bagian tanaman pangan, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja melalui penyuluh pertanian wilayah binaan Desa Siwarak, Pemerintah Desa Siwarak, serta Bank BRI KCP unit Karangreja dan organisasi masyarakat lain seperti kelompok tani desa. Berdasarkan hasil penelitian wujud koordinasi Dinas Pertanian dalam bentuk pertemuan penyuluh pertanian, adanya forum sesi diskusi.

Sementara itu, Balai Penyuluh Pertanian wujud koordinasinya melalui menjalin komunikasi dengan ketua kelompok tani dan dinas pertanian. Serta melakukan koordinasi dengan Bank BRI dalam mendata e-RDKK. Bank BRI KCP Unit Karangreja telah melaksanakan koordinasi melalui kerjasama antar kelompok tani dan penyuluh pertanian perihal penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Pihak kios pupuk lengkap melaksanakan koordinasi dalam hal penggunaan EDC dengan pihak BRI.

B. Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah

Yang dimaksud dengan perilaku birokrasi level bawah adalah kemampuan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, Penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa Siwarak, dan Pegawai Bank BRI KCP Unit Karangreja dalam menjalankan program Kartu tani di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga diluar kewenangan formal (Diskresi). Berdasarkan hasil penelitian, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) telah melaksanakan implementasi kebijakan secara diskresi hal tersebut dapat ditelaah dari pendekatan komunikasi secara personal dengan petani, melibatkan penuh pihak lain seperti PPL, KPL, dan BRI.

Sebagai penyuluh pertanian wilayah binaan Desa Siwarak juga telah melakukan diskresi dalam bentuk melaksanakan pendistribusian Kartu Tani, yang mana kegiatan tersebut merupakan tugas dari BRI KCP Unit Karangreja sebagai pihak pencetak Kartu Tani. Selain itu, PPL juga melibatkan ketua kelompok tani, pemerintah desa serta menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani dalam memberikan informasi tentang pertanian. Sementara itu, pihak BRI telah melakukan diskresi dengan komunikasi personal pada saat melakukan survei lapangan.

C. Perilaku Kelompok Sasaran

Berdasarkan pada hasil penelitian kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak terdiri dari ketua kelompok tani, pemilik kios pupuk lengkap dan petani nanas Desa Siwarak. Dalam penelitian ini menunjukkan masing-masing kelompok sasaran memiliki respon positif dan respon negatif. Dari respon positif dilihat Kartu Tani dapat memberikan kemudahan bagi kelompok sasaran dalam mengakses ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah, dan menghindari adanya kelangkaan pupuk. Sementara itu, dari respon negatif ditunjukkan dari tanggapan petani nanas terkait permasalahan dalam mengakses Kartu Tani yaitu sering terjadi Kartu Tani yang eror, dan jumlah pupuk subsidi belum cukup untuk pertanian nanas ketika jumlah pupuk pada Kartu Tani sudah mencapai habis.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penelitian ini dapat dilihat dari adanya Sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, SDM tersebut berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, dan penyuluh pertanian lapangan Desa Siwarak, adanya anggaran APBN dan

APBD yang memadai, partisipasi ketua kelompok tani dan petani dalam penyusunan RDKK, dan adanya pendampingan yang telah terkoordinir dengan beberapa instansi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupeten Purbalingga adalah keterbatasan jarak dan biaya transportasi bagi para petani yang jauh dari kios pupuk lengkap (KPL) sehingga membuat petani tidak dapat mengakses Kartu Tani, hambatan dalam proses validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu adanya perubahan data RDKK petani berkaitan dengan perubahan luas lahan pertanian, perubahan kepemilikan Kartu Tani bagi yang sudah meninggal, pergantian komoditas pertanian dan hal tersebut tanpa ada pelaporan ke pihak BPP. Sementara itu, dalam penyusunan RDKK di keanggotaan kelompok tani hambatannya terletak pada penyesuaian kebutuhan jumlah pupuk dengan luas lahan, masih banyak petani yang tidak mendaftarkan SPPT sehingga sulit mendapatkan kuota pupuk subsidi. Selain itu, perubahan penanaman jenis tanaman di Desa Siwarak membuat kebutuhan pupuk petani jauh lebih banyak. Dalam mengakses Kartu Tani hambatan terjadi di kios pupuk lengkap (KPL) Desa Siwarak yaitu seringkali terjadi kendala jaringan sehingga mempengaruhi pelayanan kartu anggota.

5. SIMPULAN

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui kementerian pertanian, yang mana kebijakan pupuk bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan sosial. Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak merupakan kebijakan dalam pemberian pupuk subsidi melalui bantuan teknologi berupa kartu ATM yang dapat diakses dalam Elektronik Data Capture (EDC) untuk memudahkan petani dalam melakukan aktifitas pertanian terutama dalam proses pembelian pupuk subsidi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak sudah berjalan dan sesuai berdasarkan pada regulasi yang ada, namun dalam beberapa hal masih belum berjalan secara optimal. Dalam analisis menggunakan teori SorenC.Winter dapat diketahui masing-masing organisasi terkait memiliki perilaku hubungan antar organisasi yang baik dalam wujud komitmen dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani. Sementara itu, perilaku birokrasi tingkat bawah dalam hal ini organisasi yang langsung melaksanakan tugas dilingkungan masyarakat telah mengimplementasikan kebijakan yang dibuat. Selain itu, melalui perilaku kelompok sasaran dapat diketahui, adanya respon positif dan respon negatif dari kelompok sasaran kebijakan dan masyarakat secara langsung adanya kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani.

Faktor pendukungnya adalah sumber daya manusia (SDM), jumlah anggota yang mumpuni cukup untuk menjalankan tugasnya, didukung oleh adanya anggaran APBN dan APBD yang sesuai, serta keterlibatan masyarakat khususnya petani. Di sisi lain, kendalanya adalah jarak dan biaya yang terbatas karena petani jauh dari kios pupuk lengkap. Artinya, petani tidak memiliki akses ke Kartu Tani dan juga mengalami kegagalan saat validasi dan kompilasi data RDKK. Selain itu, lemahnya jaringan menjadi kendala bagi petani untuk mengakses kartu tani.

6. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Anderson, J. 2012 *Public Policy Making, (Second ed.)*, New York : Holt,. Renhart and Winston, New York. AR
- Arikunto, S. (2014). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Biroinfrasda Jawa Tengah (2020). *Pengertian Kartu Tani*. April 2 2021. Retrieved from [Pengertian Kartu Tani - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah \(jatengprov.go.id\)](http://jatengprov.go.id)
- Direktorat Jenderal Hortikultura Kementrian Pertanian (2020). *PDB Triwulan II 2020, Sektor Pertanian Tumbuh Paling Tinggi*. April 2 2021. Retrieved from <http://hortikultura.pertanian.go.id/?p=5494>
- Hartatik, W., Husnain, H., & Widowati, L. R. (2015). Peranan Pupuk Organik dalam Peningkatan Produktivitas Tanah dan Tanaman. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 9(2). Retrieved from: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jsl/issue/view/JSL%20Vol.9%282%29%20Dec.2015>
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, H. (2007). *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Lipsky, M. (1980) *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services.*; New York: Russell Sage Foundation.
- Setiawan, G. (2004). *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pusatak
- Suharto . (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2014). *Keuangan Pemerintahan: Pengeluaran dan Pembelanjaan*. Penerbit Rineka Cipta.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Winter, S. C. (2003). *Implementation Perspective: Status and Reconsideration*. Dalam *Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd